

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN TANGKAP OLEH DKP KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)

Jubel Hot. P.Simanullang<sup>1</sup>, Fitri Eriyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

<sup>2</sup>) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 23 Januari 2019

Direvisi: 27 Januari 2019

Diterbitkan: Februari 2019

### KATA KUNCI

Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan, pendapatan.

### KORESPONDEN

No. Telepon: 082386201362

E-mail:

[Jubelpetra@gmail.com](mailto:Jubelpetra@gmail.com),

[fitri.eriyaniti@fis.unp.ac.id](mailto:fitri.eriyaniti@fis.unp.ac.id)

### A B S T R A K

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo yang masih perlu diberdayakan karena melihat alat tangkap yang masih minim, dan pendapatan masyarakat yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini pemerintah melalui DKP kota padang melakukan pemberdayaan melalui bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat nelayan tangkap di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, serta masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo kecamatan koto tangah. Teknik pemilihan informan adalah purposive sampling, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui DKP kota Padang yaitu masyarakat nelayan tangkap Kelurahan Pasie Nan Tigo merasa sangat terbantu dengan adanya pemberdayaan tersebut berupa Hibah dalam bentuk uang tunai dan hibah dalam bentuk bantuan barang langsung, pelatihan, dan Asuransi bagi nelayan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah perairan. Indonesia kemudian disebut dengan

istilah negara maritim dan Indonesia juga merupakan sebuah negara kepulauan dengan 17.502 buah pulau, dan luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas perairan kepulauan

dan teritorial seluas 3,1 juta km, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dan dapat dikatakan yang terbesar di dunia. Menurut data kementerian perikanan dan kelautan RI (2017), nilai potensi dan kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai U\$\$ 171 miliar per tahun. Lebih terperinci nilai potensi tersebut meliputi perikanan U\$\$ 32 miliar, wilayah pesisir U\$\$ 2 miliar, minyak bumi U\$\$ 21 miliar, dan transportasi laut sebesar U\$\$ 20 miliar.

Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat termasuk nelayan dengan cara melakukan pemberdayaan nelayan dengan membuat beberapa program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Kemiskinan dikalangan nelayan masih mewarnai pembangunan di Indonesia, potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar sangatlah kontradiktif dengan realitas yang terjadi pada saat ini dimana 98,7% nelayan Indonesia termasuk kategori nelayan kecil, dan juga 25,14% penduduk miskin Indonesia adalah masyarakat nelayan. Pengembangan potensi perikanan tradisional yang terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai Sumatera Barat, seperti Kelurahan Pasie Nan Tigo. Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah pesisir Kota Padang, sebagian besar penduduknya mempunyai mata

pencaharian sebagai nelayan, baik nelayan tetap maupun nelayan sambilan, jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan di Kelurahan ini adalah bagan, payang, pukot, pancing. Keadaan laut Pasie Nan Tigo berbeda dengan laut lainnya yaitu hanya laut lepas dan tidak ada hambatan tumpuan bagan, dan hasil tangkapan dijual kedaerah Sumatera Barat bahkan sampai kepulauan Jawa.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa masyarakat nelayan tangkap di Kelurahan Pasie Nan Tigo belum memiliki alat tangkap yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan, usaha ataupun kegiatan yang dilakukan nelayan Pasie Nan Tigo jika tidak melaut malah berkeburu sebagai salah satu usaha untuk menambah penghasilannya. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kota Padang di daerah pesisir yaitu di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah sudah diterapkan, seperti program dari Pemerintah yaitu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), yaitu berupa bantuan alat tangkap yang diberikan kepada nelayan seperti jaring dan juga mesin kapal, akan tetapi hal tersebut belum bisa memutus mata rantai belenggu kemiskinan, sebenarnya program pemerintah untuk masyarakat nelayan ini sudah lama terutama dalam pemberdayaan nelayan, akan tetapi dampak dan manfaatnya belum maksimal dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo yaitu keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai Teknologi, tidak memiliki modal yang cukup, kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo dalam memberdayakan dan juga mengembangkan potensi hasil panen tangkapan sendiri, dan juga pelatihan ataupun pelatihan yang cenderung tidak tersalurkan secara optimal, ditambah lagi semakin terbatasnya sumber daya laut yang bisa digunakan dan juga mekanisme pasar dan posisi tawar dihadapan tengkulak yang membuat nelayan semakin tidak berdaya. Kebijakan pemberdayaan di sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah Kota Padang tersebut masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan kemiskinan rumah tangga nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak kepada peningkatan segala usaha dan juga perbaikan kualitas kehidupan mereka. Keterbatasan modal usaha sehingga menyulitkan nelayan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi keluarganya. Sehubungan dengan hal itu, sebagian besar masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang juga masih hidup dalam perangkap kemiskinan. Secara umum, kemiskinan nelayan bersifat struktural dan merupakan residu pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat nelayan tradisional yang lebih

efektif dan efisien supaya tidak tertinggal dengan masyarakat moderen, oleh sebab itu pemberdayaan nelayan tradisional khususnya bidang tangkap di Kelurahan Pasie Nan Tigo sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, karena dengan meningkatnya sumber daya manusia maka akan berdampak terhadap sektor yang lainnya seperti pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo akan meningkat.

Di lingkungan masyarakat nelayan Kelurahan Pasie nan Tigo Kota Padang, sudah lazim terjadi semacam pembagian kerja, bahwa suami bertugas mencari ikan dilaut, sedangkan istri nelayan cenderung sebagai ibu rumah tangga saja bahkan ada sebagian yang bekerja pada tahap pengolahan dan juga pemasaran hasil ikan yang ditangkap oleh suaminya. Untuk mencari peluang peluang kegiatan ekonomi dan juga menambah penghasilan nelayan, dan supaya masyarakatnya lebih mandiri serta meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis telah melakukan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah tentang pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap oleh DKP Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap oleh DKP Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan

- rumah tangga nelayan yang telah dilakukan di Kelurahan Pasie Nan Tigo?
2. Apa Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap oleh DKP Kota Padang terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah?
  3. Apa solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap oleh DKP Kota Padang di Kelurahan Pasie Nan Tigo?

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Yusuf (2016:329) Penelitian Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, maka peneliti adalah sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian ini dibantu dengan pedoman wawancara dan panduan observasi yang telah diarsipkan sebelumnya, kemudian dibantu dengan alat pengumpulan data lainnya berupa handphone dan kamera yang digunakan untuk merekam proses wawancara dengan informan penelitian dan catatan lapangan yang berisi data-data peneliti selama melakukan observasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang menggambarkan pengamatan,

tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh dilapangan. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang bersumber dari observasi, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber karena data yang diperoleh merupakan data dari banyak sumber, sehingga teknik yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi digunakan untuk mencocokkan sumber yang peneliti peroleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap Oleh DKP Kota Padang Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah**

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang dikategorikan kedalam masyarakat kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah. Dalam menjalankan sebuah kebijakan yaitu terkait dalam pemberdayaan

masyarakat nelayan tangkap, pemerintah juga membutuhkan proses komunikasi yang baik dengan masyarakat supaya seluruh masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan yang akan diterapkan.

Menurut Suharto (1997) dalam Mardikanto (2013: 170) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, mengemukakan adanya 4 (empat) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, yaitu:

#### 1. Motivasi

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang bahwa motivasi yang diberikan oleh DKP yaitu dengan cara memberikan hibah. Hibah merupakan pemberian uang atau barang serta jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pemberian hibah ini, pihak DKP Kota Padang memberikan hibah tersebut kepada masyarakat nelayan dengan melihat kondisi nelayan tersebut, apakah nelayan tersebut layak mendapatkannya atau tidak. Dalam pemberian hibah kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan:

a) Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi Hukum dan HAM paling singkat 2 tahun kecuali ditentukan lain oleh UU.

- b) Berkedudukan pada wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.
- c) Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Jadi dalam hal ini pihak DKP kota Padang memberikan hibah kepada masyarakat nelayan tangkap dengan melihat bagaimana kondisi masyarakat tersebut, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Pasie Nan Tigo bahwa pihak DKP memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan berupa hibah. Hibah itu ada dua bentuk yaitu hibah dalam bentuk uang tunai dan hibah dalam bentuk barang. *Pertama*, pemberian hibah dalam bentuk uang tunai atau langsung diberikan kepada nelayan, pemberian uang tersebut diberikan kepada nelayan melalui kelompok nelayan yang memiliki pengurus yaitu ketua, sekretaris serta bendahara kelompok, serta kelompok nelayan tersebut telah memiliki badan Hukum yang jelas. *Kedua*, hibah dalam bentuk barang yang diberikan kepada masyarakat nelayan yaitu berupa alat tangkap yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut seperti mesin yang 40 PK, 20 PK, serta jenis mesin Lontel, Armada kapal, jaring dan juga alat tangkap lainnya seperti kotak (box) yang besar sebagai tempat untuk menyimpan ikan, dan juga beberapa alat yang dibutuhkan sewaktu melakukan proses penangkapan ikan dilaut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan motivasi berupa hibah yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang sangat penting dalam keberhasilan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, sesuai dengan pendapat Suharto dalam Mardikanto (2013: 170) bahwa kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

## 2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang bahwa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat nelayan yaitu DKP Kota Padang memberikan pelatihan terhadap masyarakat nelayan dengan cara mengumpulkan masyarakat nelayan ditempat yang telah ditentukan yaitu di kantor lurah maupun di SP3N, maka disanalah nelayan tersebut dibina serta diberikan arahan. Kegiatan pelatihan tersebut tidak tergantung waktu yang ditentukan akan tetapi jika pihak nelayan butuh dibina maupun diberikan pelatihan, maka ketua KUB nelayan tersebut langsung melakukan komunikasi dengan pihak DKP Kota Padang supaya pihak

DKP langsung turun kelapangan meninjau masyarakat nelayan, dan pelatihan tersebut langsung di dampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Jadi dalam hal ini pihak DKP Kota Padang membantu masyarakat untuk meningkatkan mata pencarian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka. Dalam menjalankan suatu program pemberdayaan pelatihan merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, karena dengan adanya pelatihan yang baik maka program tersebut dapat nantinya berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat Suharto dalam Mardikanto (2013: 170) bahwa Pelatihan dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencarian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar wilayah atau daerah tempat tinggalnya.

## 3. Manajemen diri

Hasil penelitian yang dilakukan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo bahwa masyarakat nelayan membuat suatu kelompok nelayan yang berstatus jelas yaitu mempunyai badan hukum. Kelompok tersebut dibentuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat nelayan, sehingga nelayan dapat mengajukan permintaan berupa alat tangkap yang mereka butuhkan. Masyarakat nelayan juga memilih

pemimpin mereka yaitu sebagai ketua KUB, sekretaris, serta bendahara kelompok tersebut, dan masyarakat yang telah membentuk kelompok tersebut membuat suatu pertemuan-pertemuan dengan pihak DKP Kota Padang untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Berdasarkan Suharto dalam Mardikanto (2013: 170) bahwa setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan juga mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, dan juga manajemen kepemilikan masyarakat.

#### 4. Mobilisasi sumber daya

Hasil penelitian yang dilakukan dengan kelompok nelayan bahwa masyarakat kelompok nelayan mampu membentuk suatu kelompok yang merupakan hasil kesepakatan mereka dengan memilih satu pemimpin dalam kelompok tersebut. Masyarakat nelayan tersebut juga mengembangkan kualitas sumber daya manusianya dengan membuat suatu kebijakan dengan cara membuat iuran perbulan bagi setiap anggota nelayan, uang tersebut kemudian dikumpulkan sebagai uang kas bagi kelompok nelayan tersebut dan digunakan untuk kebutuhan dalam KUB tersebut. Berdasarkan Suharto dalam Mardikanto (2013: 170) bahwa untuk memobilisasi sumber daya masyarakat diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan

reguler dan juga sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial.

### **B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap Oleh DKP Kota Padang Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah**

Dalam melakukan suatu pemberdayaan itu pasti memiliki beberap hambatan yang dapat menghalangi kelancaran program tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti hambatan teknis yaitu sarana dan juga prasarana serta hambatan perilaku yaitu sifat apatis, egosentris dan juga ketidakmauan untuk berubah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di DKP Kota Padang maupun di Kelurahan Pasie Nan Tigo ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap tersebut (*sumber : wawancara tanggal 27 juli 2018 Bidang perikanan tangkap DKP Kota Padang*):

#### a) *Publics respons* (bersifat negatif)

*Publics respons* adalah bagaimana tanggapan masyarakat setelah pemberdayaan dilakukan, disini respon masyarakat dapat dikatakan negatif karena menurut pihak DKP Kota Padang ketika adanya pelaporan yang harus dilakukan masyarakat nelayan terkait perkembangan pemanfaatan bantuan alat tangkap ikan

yang telah diberikan sebagian mereka tidak memberikan laporan tentang perkembangan yang telah dicapai dengan bantuan alat tangkap ikan tersebut dengan sepenuhnya dan pelaporan itu hanya dilakukan oleh beberapa nelayan saja. Bahkan ada informasi bahwa salah satu dari alat tangkap yang diberikan oleh pemerintah mereka jual secara diam-diam. Selain itu ketika ada pengecekan ke lapangan mengenai perkembangan penggunaan alat tangkap ikan yang diberikan, mereka sedang tidak menggunakan alat tangkap tersebut dengan alasan tidak ada modal untuk melaut. Hal ini menjadi suatu kendala dalam pencapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap tersebut.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum tercapainya tujuan yang maksimal dari program pemberdayaan ini, dimana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan tangkap yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Namun kenyataannya menurut pihak DKP kota Padang program tersebut belum menyentuh semua masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang apatis dan kurang mendukung program dari pemerintah tersebut, sehingga masyarakat nelayan belum sepenuhnya paham mengenai

pemberdayaan itu serta sumber daya manusianya yang masih rendah. Menurut Mardikanto (2013: 190) bahwa masyarakat sebagai pelaku utama (baik sebagai manusia, sebagai pengelola usaha, maupun sebagai warga masyarakat) toko masyarakat, pengusaha, pedagang, peneliti, akademis.

**C. Upaya mengatasi kendala**

Seperti halnya kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap ini harus didukung oleh beberapa faktor sehingga tujuan dari pemberdayaan tersebut tercapai. Pemberdayaan ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang dapat mendukung dalam melakukan pemberdayaan nelayan tangkap di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah. Menurut wijaya (2015:56) ada beberapa faktor untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap

a. Sumber Daya Manusia, yang menjadi komunikator merupakan orang-orang yang memang ahli dibidangnya. Dan masyarakat nelayan sebagai peserta pelatihan juga mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga pihak DKP berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan pelatihan yang baik terhadap masyarakat nelayan, yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat nelayan, nelayan dibuat suatu pertemuan. Kemudian pihak DKP yaitu yang



- bertugas dibidang perikanan tangkap secara langsung menjelaskan bagaimana bentuk pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
- b. Meningkatkan sosialisasi peraturan dan pemahaman tentang aturan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut bagi nelayan.
  - c. Mengembangkan program pemberdayaan yang diselenggarakan secara terkoordinasi.
  - d. Sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan mendukung, dimana dana yang dibutuhkan di berikan oleh pemerintah yaitu dibawah naungan KKP. Sehingga dengan demikian pihak DKP dengan mudah melaksanakan segala bentuk tugas dan tanggung jawabnya terutama dibidang pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap, karena didukung oleh sumber dana dan fasilitas yang memadai.
  - e. Sarana dan prasarana, untuk lokasi pelatihan DKP Kota Padang mempunyai gedung SP3N di wilayah Koto Tengah yang biasanya dijadikan sebagai tempat kegiatan pelatihan sehingga tidak sulit untuk melakukan pelatihan, dan juga tempat tersebut juga dilakukan sebagai wadah untuk melatih sekaligus membina nelayan tangkap yang berada di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang dikategorikan kedalam masyarakat kurang mampu atau masyarakat menengah ke bawah.

**Pertama,** Motivasi, motivasi yang diberikan oleh pihak DKP kota padang kepada masyarakat nelayan adalah dengan memberikan hibah kepada masyarakat nelayan tangkap dengan melihat bagaimana kondisi masyarakat tersebut, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Pasie Nan Tigo bahwa pihak DKP memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan berupa hibah. Hibah itu ada dua bentuk yaitu hibah dalam bentuk uang tunai dan hibah dalam bentuk barang. **Kedua,** Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang bahwa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat nelayan yaitu DKP Kota Padang memberikan pelatihan terhadap masyarakat nelayan dengan cara mengumpulkan masyarakat nelayan ditempat yang telah ditentukan yaitu di kantor lurah mapun di SP3N, maka disanalah nelayan tersebut dibina serta diberikan arahan. **Ketiga,** Manajemen diri, hasil penelitian yang dilakukan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo bahwa masyarakat nelayan membuat suatu kelompok nelayan yang berstatus jelas yaitu mempunyai badan hukum. **Keempat,** Mobilisasi

sumber daya, hasil penelitian yang dilakukan dengan kelompok nelayan bahwa masyarakat kelompok nelayan mampu membentuk suatu kelompok yang merupakan hasil kesepakatan mereka dengan memilih satu pemimpin dalam kelompok tersebut.

Adapun kendala dalam melakukan pemberdayaan yang dapat menghalangi kelancaran program tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya seperti :*Pertama, Publics respons* (bersifat negatif), masyarakat nelayantidak memberikan laporan kepada DKP tentang perkembangan yang telah dicapai dengan bantuan alat tangkap ikan tersebut dengan sepenuhnya dan pelaporan itu hanya dilakukan oleh beberapa nelayan saja, bahkan ada informasi bahwa salah satu dari alat tangkap yang diberikan oleh pemerintah mereka jual secara diam-diam. *Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM)*, masih banyaknya masyarakat yang apatis dan kurang mendukung program dari pemerintah tersebut, sehingga masyarakat nelayan belum sepenuhnya paham mengenai pemberdayaan itu serta sumber daya manusianya yang masih rendah.

Solusi pada kendalah diatas adalah masyarakat nelayan sebagai peserta pelatihanjuga mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga pihak DKP berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan pelatihan yang baik terhadap masyarakat nelayan, meningkatkan sosialisasi peraturan dan pemahaman tentang aturan dalam melakukan

penangkapan ikan dilaut bagi nelayan, mengembangkan program pemberdayaan yang diselenggarakan secara terkoordinasi, serta sarana dan prasarana untuk lokasi pelatihan DKP Kota Padang mempunyai gedung SP3N di wilayah Koto Tangah yang biasanya dijadikan sebagai tempat kegiatan pelatihan sehingga tidak sulit untuk melakukan pelatihan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik karena bimbingan dan arahan dari Ibu Dra. Fitri Eriyanti M.Pd.,Ph.D kemudian kritik dan saran dari Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si dan Bapak Zikri Alhadi S.IP., MA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar M. Oos. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*.Bandung : Alfabeta.
- Chabib Soleh. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung : FokusMedia
- Kaelan H. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Indisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora*. Yogyakarta: Gramedia
- Mardianto. 2013. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Muliyono Edy Sungkowo. 2017. *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Muri Yusuf. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Padang: Gramedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendra.2006. *Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta

## Jurnal

- Cawalinya Livsanthi Hasyim Dan Elisabeth Cory Ohoiwutun. 2017. Peran Komunikasi Dalam Pemberdayaan Nelayan Tradisional Pada Masyarakat Pesisir (Pmp) Di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Pikom*. Vol. 18 No. 1.
- Fanesa Fargomeli. 2014. Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. *Journal Acta Diurna. Volume Iii. No.3*
- Wijaya, Ida Suryani. 2015. "Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan". *Lentera*, Vol. XVIII No. 1 Hal: 53-61

## Peraturan dan Undang-Undang

- UU No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
- Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI perlindungan dan Pemberdayaaan Nelayan Melalui Kartu Nelayan.
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Walikota Padang Nomor 295A Tahun 2015 Tentang Nelayan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

## BIOGRAFI PENULIS



### Jubel Hot. P. Simanullang

Lahir di Sitinjo kecamatan pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Uatara, 01 juli 1996. Anak ke-5 dari 5 bersaudara, penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Purba sianjur, dilanjutkan SMP N 5 Pakkat, dilanjutkan SMA N 1 Pakkat, hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Universitas Negeri Padang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara